LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN JULI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 6 Agustus 2021

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Perempuan dan Anak
3. Para Kasi
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pejabat Verifikasi/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

D. Notulis

Pelaksana Sub Bag Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 56,12 %

b.Keuangan = 10.771.169.966 (52,28%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Administrasi Umum							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	480.000			0		
1	Belanja Penggandaan	480.000	30	0	0	(30)	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.710.000			4.700.000		
1	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.710.000	45,41	34,07	4.700.000	(11,34)	Menyesuaikan kebutuhan, kondisi pandemi ini menuntut pembatasan penerimaan tamu/kunjungan kerja baik dari luar OPD maupun luar Provinsi/Kab/Kota sehingga penyelenggaraan rapat-rapat dilaksanakan secara virtual (adanya PPKM

							darurat), sehingga realisasi tidak dapat memenuhi target.
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.500.000			2.120.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000	44,60	27,72	2.120.000	(16,88)	adanya PPKM sehingga tidak memungkinkan melakukan perjalanan Dinas
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	6.440.000			0		
1	Belanja Pemeliharaan Mebelair	6.440.000	50	0	0	(50)	Memaksimalkan penggunaan aset yang ada, dan sehubungan dengan pelaksanaan PPKM darurat maka mengurangi interaksi dengan pihak luar
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	56.110.000			47.654.000		
1	Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak	35.160.000	100	86,12	29.074.000	(13,88)	karena PPKM darurat
2	Peningkatan Wawasan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	20.950.000	100	88,68	18.580.000	(11,32)	karena PPKM darurat
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	45.262.000			1.000.000		
1	Penyusunan GDPK	45.262.000	5,89	3,53	1.000.000	(2,36)	adanya PPKM cukup menghambat jalannya

							penyusunan, dan kondisi mitra kerja sebagai tenaga ahli (akademisi) dalam keadaan yang kurang baik(masih isolasi mandiri)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	67.767.000			5.992.000		
1	Orientasi Kader Kelompok BKB Di Kampung KB	35.744.000	100	24,53	5.992.000	(75,47)	
2	Orientasi Kader Kelompok BKR	32.023.000	100	0	0	(100)	Adanya kebijakan Pemerintah tentang pemberlakukan PPKM darurat sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.481.379.000			711.749.000		
1	Pelayanan KB MKJP	1.481.379.000	49,90	29,32	711.749.000	(20,59)	Kegiatan pelayanan KB MKJP di daerah banyak yang tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan PPKM darurat.
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	129.321.000			70.435.000		
1	Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja	46.291.000	100	96,38	32.185.000	(3,62)	Pelaksanaan kegiatan ini terkena dampak refocusing sehingga anggaran yang tersisa yaitu Uang Harian, akan dilakukan perubahan pada saat perubahan APBD.

2	Pengembangan Model KIE tentang KB-KS	83.030.000	100	93,00	38.250.000	(7,00)	kegiatan monitoring model kie tentang kb ks belum dapat dilaksanakan karena adanya ppkm
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	4.800.000			0		
1	Rakor data kekerasan	4.800.000	100	0	0	(100)	Rakor semula direncanakan dengan format pertemuan secara tatap muka, dan karena kondisi pandemi meningkat dan ada SE Sekda agar tidak mengadakan pertemuan secara tatp muka dan ketika akan dilakukan secara daring, narasumber tidak bisa karena harus menjalankan isolasi terpusat (rakor ini dimaksudkan untuk pelatihan teknis aplikasi ekekerasanjateng yang sudah terintegrasi dengan Simfoni PPA, sehingga akan lebih efektif kalau dilakukan secara tatap muka.)

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	13	0	0		

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	21	0	0		

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Bulan Juli terdapat 16 kegiatan yang berdeviasi antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Makanan dan Minuman Tamu dikarenakan Menyesuaikan kebutuhan, kondisi pandemi ini menuntut penyelenggaraan rapat-rapat secara virtual (adanya PPKM), sehingga realisasi tidak dapat memenuhi target.
2. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dikarenakan Meningkatnya kasus Covid19 sehingga dikeluarkannya SE Gub tentang pembatasan PPKM maka Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah tidak diperbolehkan sehingga capaiannya dibawah target yang ditentukan.
3. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja penggandaan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan.

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Pakan Ikan dikarenakan Menyesuaikan kebutuhan, dikarenakan ikan arwana (dalam aquarium) mati, maka pagu anggaran sisa akan diajukan pada perubahan APBD.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Pemeliharaan Mebelair dikarenakan Mengoptimalkan aset yang tersedia, dan mengurangi kontak dengan pihak luar untuk pencegahan penularan covid 19.
6. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi ada 3 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelatihan PUG bagi SMA/SMK , Peningkatan Wawasan Terkait PUG dan Lomba Project Implementasi PUG bagi SMA/SMK dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tsb.
7. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelatihan PPEP dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tsb.
8. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi, ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Penyusunan Draft Pergub PPT Provinsi Jawa Tengah dikarenakan adanya Kebijakan PPKM sehingga kegiatan yang seharusnya dilakukan Pertemuan Langsung tidak dapat dijalankan di bulan Juli.
9. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Layanan PUSPAGA adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tsb.
10. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Verifikasi KLA Tingkat Provinsi Jawa Tengah dikarenakan pandemi covid-19 sehingga pertemuan dilakukan melalui online dan Provinsi belum dilibatkan dalam proses verifikasi KLA.
11. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi ada 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Peningkatan Wawasan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM darurat, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tsb.
12. Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Penyusunan GDPK dikarenakan Dinas Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Akademisi sebagai tenaga ahli dalam menyusun GDPK (USM), pada saat ini tenaga ahli tsb terdampak Covid19(Isoman) sehingga belum bisa menyusun GDPK tsb.
13. Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ada 3 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Orientasi Kader Kelompok BKB Di Kampung KB, Orientasi kader kelompok BKR dan Belanja Jasa Tenaga Teknis dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM darurat, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tsb dan Rekrutmen tenaga teknis tidak dilaksanakan, pagu anggaran akan di rasionalisasi pada saat perubahan APBD.
14. Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelayanan KB MKJP dikarenakan Kegiatan di lapangan kurang maksimal karena kondisi pandemi, dampak dari kebijakan PPKM darurat sehingga banyak daerah yang tidak ada pelayanan KB MKJP.
15. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja ada 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja dikarenakan Pelaksanaan kegiatan ini terkena dampak refocusing sehingga anggaran yang tersisa yaitu Uang Harian, akan dilakukan perubahan pada saat perubahan APBD dan Pengembangan Model KIE tentang KB-KS dikarenakan kegiatan monitoring model kie tentang KB KS belum dapat dilaksanakan karena adanya PPKM darurat.
16. Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Rakor Data Kekerasan hal ini disebabkan Rakor semula direncanakan dengan format pertemuan secara tatap muka, dan karena kondisi pandemi meningkat dan ada SE Sekda agar tidak mengadakan pertemuan secara tatp muka dan ketika akan dilakukan secara daring, narasumber tidak bisa karena harus menjalankan isolasi terpusat (rakor ini dimaksudkan untuk pelatihan teknis aplikasi ekekerasanjateng yang sudah terintegrasi dengan Simfoni PPA, sehingga akan lebih efektif kalau dilakukan secara tatap muka.)

Upaya

Upaya mengatasi permasalahan 16 kegiatan yang berdeviasi negatif yaitu pada bulan Agustus diupayakan untuk pelaksanaan 16 kegiatan tersebut, namun untuk 3 SSK antara lain Belanja Jasa Tenaga Teknis, Belanja Pakan Ikan, dan Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja kegiatan menunggu perubahan APBD.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan di Bulan Agustus sebagai berikut:

Sekretariat

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota.
3. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaPenguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Provinsi.
5. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan Provinsi.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Pemanduan dan Sinkronasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kualitas PendudukPembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja.
2. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi.

V. PENUTUP

Kesimpulan rapat koordinasi pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabid/Kasi/Kasubbag agar selalu mengontrol dan mencermati realisasi fisik dan keuangan serta reasoningnya pada aplikasi e-controlling setiap akhir bulan.
2. Masing-masing bidang agar mematuhi pelaksanaan kegiatan sesuai awal perencanaan yang ada di e-rko, sehingga dapat meminimalisir terjadinya deviasi.
3. Kabid/Kasi/Kasubbag agar mencermati kembali indikator capaian di RPJMD, renstra, renja dan progressnya.
4. Para Kabid/Kasi/Kasubbag diharap untuk mulai menyiapkan anggaran perubahan TA 2021.

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaÂ Provinsi Jawa Tengah bulan Juli 2021, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat 6 Agustus 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM
NIP. 196811241993102001